

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH  
PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU  
PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT**



**Skripsi Oleh:**

**RIANI AYU ANGGRAINI**

**01091003045**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2013**

336.240 7  
Ria  
a  
C/C-7 131959  
2013

21575

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH  
PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU  
PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT**



**Skripsi Oleh:**  
**RIANI AYU ANGGRAINI**  
**01091003045**  
**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH  
PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU  
PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT**

Disusun oleh :


Nama Mahasiswa : Riani Ayu Anggraini  
NIM : 01091003045  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 6 September 2013

Ketua :   
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak  
NIP 196508161995121001

Tanggal : 6 September 2013

Anggota :   
Aryanto, S.E., M.TI., Ak  
NIP 197408142001121003

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

### ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT


Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Riani Ayu Anggraini  
NIM : 01091003045  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 6 September 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 6 September 2013

Ketua

  
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak  
NIP 196508161995121001


Anggota

  
Aryanto, S.E., M.TI., Ak  
NIP 197408142001121003

Anggota

  
Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si, Ak  
NIP 197802102001122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak  
NIP 196508161995121001

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riani Ayu Anggraini  
NIM : 01091003045  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan PPh Pasal 23 Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat**

Pembimbing :


Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak  
Anggota : Aryanto, S.E., M.TI., Ak  
Tanggal Ujian : 6 September 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 6 September 2013

Pembuat Pernyataan,

  
  
Riani Ayu Anggraini  
NIM 01091003045

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Dan Pph Pasal 23 Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 23 menggunakan metode *paired sample t-test*. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Aryanto, S.E., M.TI., Ak selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhumah Ibu Hj. Dewi Rina Komarawati S.E., M.M., BKP, Ak. Selaku Pembimbing II sebelumnya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Hj. Relasari, S.E., M.Si, A.k. Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih banyak atas bimbingan dan konsultasinya selama ini.
6. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Kedua Orang Tua, Ayah, Ibnu Sirin, S.E. dan Ibu, Yenny Maryani terima kasih banyak atas dukungan dan doa yang tak terhingga dan tanpa henti setiap waktu.
8. Adik, Iryandra Syafri dan Muhammad Rabtsan Adi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
9. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabat terbaikku, Rizki Kusuma Damayanti, Reni Dwi Avianti, Bunga Tiara Rastanti, Inka Anakusuma, Nadia Hanim, Ria Kemala Dewi,

Seftiara Maulida Rachmi, Andina Prastiwi, Icha Fauziah, Muhammad Alman Fuadi, Kemas M. Luthfi

12. Muhammad Amran Toluna, terima kasih atas semua doa, waktu, semangat, dan dukungannya.
13. Semua teman-teman Akuntansi 2009

Penulis,



Riani Ayu Anggraini

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT

Oleh:

Riani Ayu Anggraini

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki kontribusi dan merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 terutama dalam hal perubahan tarif pajak penghasilan dapat memberikan dampak yang beragam, baik maupun buruk atau bahkan sama sekali tidak memberikan dampak apa pun terhadap sektor pajak nasional. Penelitian ini akan membahas pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 membawa perbedaan terhadap jumlah Wajib Pajak Badan, penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat dalam rentang tahun 2006-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah *metode paired sample t-test*, dimana jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 23 merupakan variabel bebas.

**Kata kunci :** *perubahan tarif pajak penghasilan, jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 23*



## ABSTRACT

### **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PPH PASAL 23 SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR BARAT**

**Oleh:**

Riani Ayu Anggraini; Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak; Aryanto, S.E., M.TI., Ak

*Tax is another source of state revenue has contributed and is the main source for financing the implementation of the State and national development. Reform of the Income Tax Act number 36 of 2008, especially in terms of changes in income tax rates can provide immeasurable impact, good or bad or even no impact whatsoever on the national tax sector. This research will discuss the effect of changes in income tax rates before and after the enactment of the Income Tax Act number 36 of 2008. The purpose of this study was to determine whether the application of the Income Tax Act number 36 of 2008 to bring a difference to the amount of the Taxpayer, corporate income tax receipts, and the amount of income tax revenue in Article 23 at the Tax Office of Pratama Palembang Ilir Barat. The data used in this study is secondary data is the number of the Taxpayer, the amount of corporate income tax receipts, and the amount of income tax revenue in Article 23 at the Tax Office of Pratama Palembang Ilir Barat year span from 2006 to 2011. Technique is the method of analysis used paired sample t-test, where the number of the Taxpayer, the amount of corporate income tax receipts, and the amount of income tax article 23 is a free variable.*

**Keywords:** *changes in income tax rates, the amount of the Taxpayer, the amount of corporate income tax receipts, and the amount of income tax of Article 23*

## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Riani Ayu Anggraini  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/TglLahir : Palembang/30 April 1991  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jalan Macan Kumbang 1 no. 31A Palembang  
Alamat E-mail : ace\_30491@yahoo.com

### **Pendidikan Formal :**

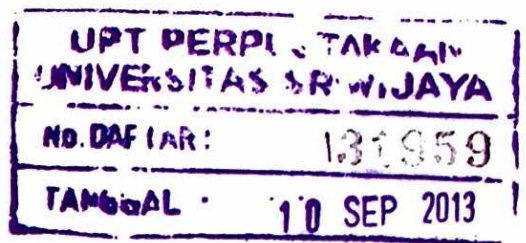
1. SD Xaverius 5 Palembang (1997-2003)
2. SMP Xaverius 1 Palembang (2003-2006)
3. SMA Xaverius 1 Palembang (2006-2009)

### **Pendidikan Non Formal :**

1. LBPP Lia Palembang (2011)

### **Pengalaman Organisasi :**

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya (2009/2010)
2. Anggota Divisi Seni dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya (2010/2011)
3. Wakil Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya (2011/2012)



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Pengertian Pajak .....	10
2.1.2. Wajib Pajak .....	12

2.1.3. Subjek Pajak .....	13
2.1.4. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	14
2.1.5. Objek Pajak .....	15
2.1.6. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak .....	18
2.1.7. Pengelompokan Pajak .....	21
2.1.8. Fungsi Pajak .....	23
2.1.9. Pajak Penghasilan .....	23
2.1.10. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	24
2.1.11. Tarif Pajak Penghasilan .....	24
2.1.12. Pasal 31E .....	25
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	26
2.3. Kerangka Pemikiran .....	27
2.4. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	29
3.2. Sumber Data .....	29
3.3. Populasi .....	30
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5. Variabel Penelitian .....	32
3.5.1. Wajib Pajak Badan .....	32
3.5.2. Pajak Penghasilan Badan .....	33
3.5.3. PPh Pasal 23 .....	33
3.6. Tarif .....	34
3.4. Teknik Analisis .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	37
4.1.1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	37
4.1.2. Wilayah Kerja .....	39
4.1.3. Visi, Misi, dan Motto KPP .....	40
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	40
4.1.4.1. Tugas Pokok .....	40
4.1.4.2. Fungsi .....	40
4.1.5. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan .....	41
4.1.6. Struktur Organisasi .....	42
4.1.7. Uraian Jabatan KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	43
4.1.8. Deskripsi Data Penelitian .....	45
4.1.8.1. Jumlah Wajib Pajak Badan .....	45
4.1.8.2. Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	47
4.1.8.3. Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 .....	48
4.2. Hasil Penelitian .....	49
4.2.1. Hasil Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan .....	50
4.2.2. Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	52
4.2.3. Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 .....	54
4.3. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	59
5.3. Saran .....	60
Daftar Pustaka.....	62

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perbedaan Tarif UU PPh Tahun 2000 dan 2008 untuk WP Badan ...	25
Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2006-2011 .....	46
Tabel 4.2. Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan Tahun 2006-2011 ...	47
Tabel 4.3. Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 Tahun 2006-2011 .....	48
Tabel 4.4. Paired Samples Statistics Hasil Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan .....	50
Tabel 4.5. Paired Samples Correlations Hasil Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan .....	50
Tabel 4.6. Paired Samples Test Hasil Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan .....	51
Tabel 4.7. Paired Samples Statistics Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	52
Tabel 4.8. Paired Samples Correlations Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	52
Tabel 4.9. Paired Samples Test Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	53
Tabel 4.10. Paired Samples Statistics Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23.....	54
Tabel 4.11. Paired Samples Correlations Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23.....	54
Tabel 4.12. Paired Samples Test Hasil Analisis Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Jumlah Wajib Pajak Badan 2006 - 2011 .....	62
Lampiran 2 Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan 2006 - 2011 .....	62
Lampiran 3 Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 2006 - 2011 .....	62



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah besar. Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia pasti sedang gencar – gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan banyak biaya. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan negara, yang bersumber baik dari penerimaan sektor migas maupun nonmigas. Saat ini yang mendominasi penerimaan dalam negeri adalah sektor nonmigas karena migas memiliki harga yang berfluktuasi di pasar internasional sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara. Salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor nonmigas adalah penerimaan pajak (Ario Baskoro, 2010). Pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor perpajakan mempunyai proporsi 50% lebih dari penerimaan APBN (John Hutagaol, 2007). Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dalam sektor ini, diantaranya dengan melakukan perubahan Undang-undang perpajakan.

Pajak penghasilan sebagai salah satu objek dalam reformasi perpajakan juga terus mengalami perubahan. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan ini pertama kali terakomodasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, kemudian seiring berkembangnya zaman, maka undang-undang ini telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan terakhir, pemerintah kembali melakukan beberapa perubahan peraturan perpajakan dengan mengeluarkan perundang-undangan pajak yaitu Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penghimpunan pajak di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam rangka peningkatan potensi penerimaan pajak, maka dilakukan reformasi perpajakan, baik yang berkaitan dengan internal DJP maupun eksternalnya, dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Reformasi perpajakan terakhir pada tahun 2007 ini dilakukan dengan mengubah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ika, 2005). Reformasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap Wajib Pajak. Walaupun perubahan yang dilakukan tidak sebanyak pada tahun 1994, namun mampu meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia (Radianto, 2004).

Abimanyu (2006) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000 bukanlah tanpa tujuan. Adapun tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang pajak tersebut adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian (Ika, 2005). Salah satu cara yang dilakukan dalam reformasi perpajakan ini yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Selain itu, Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga mengalami kenaikan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Perubahan paket Undang-undang perpajakan yaitu dengan cara mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga terjadi peningkatan laba yang pada akhirnya penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Perubahan dalam Undang-Undang mengenai pajak penghasilan tersebut, terutama dilihat dari segi lapisan penghasilan dan tarif pajak yang dikenakan baik kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Adapun maksud dari dilakukannya perubahan ini adalah agar lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya; dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan

terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat, dengan judul penelitian, **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan PPh Pasal 23 Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat?
3. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan Pasal 23 sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat
2. Perbedaan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat
3. Perbedaan terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 23 sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian yang disajikan untuk penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi instansi terkait

Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkapan atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Badan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak Negara.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan pribadi mahasiswa dan juga bermanfaat sebagai kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama berada di bangku kuliah ke dalam praktek dunia kerja yang nyata.

c. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Skripsi**

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Bab ini berisi landasan teori terhadap masalah yang terkait dengan penulisan ini, antara lain mengenai konsep – konsep teori seperti pengertian pajak; pembagian wajib pajak, subjek pajak, yang tidak termasuk subjek pajak, objek pajak, yang tidak termasuk objek pajak; pengelompokan pajak; fungsi pajak; pengertian pajak penghasilan; dan tarif pajak penghasilan .Selain berisi mengenai landasan teori, dikemukakan mengenai penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## **Bab III METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan bab yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, populasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat, hasil penelitian sesuai rumusan masalah penelitian dan pembahasan yang menyajikan temuan penelitian yang berasal dari hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

## **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan



sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak IIR Barat dan saran-saran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Ditjen Pajak, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2013. Data Pokok APBN 2006-2012. Diambil pada Maret 2013 dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=878>
- Sumitro, Rokhmat, Raden. (1993). *Pajak Penghasilan 1984 / Diuraikan oleh Rochmat Soemitro*, Cetakan 4, Bandung : Eresco.
- Djuanda, G. & Lubis, I. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Cetakan kedua. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Staf Pengajar. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada Kpp Yogyakarta Satu*. Penelitian. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Nurmayanti, Irma. 2012. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya)*. Skripsi. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Widjaya, Annisa Gama. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan*

- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. Skripsi.  
Universitas Diponegoro, Semarang
- Fitriyani, D., Maiyarni, R., dan Gowon, M. Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Skripsi. Universitas Jambi, Jambi
- Diana, Anastasia. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priyatno, Duwi. 2011. *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta : MediaKom
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Tjahjono, Ahmad, F. Hussain, M. 2000. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMF YKPN
- Baskoro, Ario. 2010. Dalam 2 Tahun Indonesia Bebas Hutang. Diambil Maret 2013 dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/29/dalam-2-tahun-indonesia-bebas-hutang-129174.html>
- Hutagaol, John. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Diambil Maret 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Ika, Siti Rochma. 2005. *Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo
- Radianto. Wirawan E.D. 2004. *Analisis Efisiensi Perusahaan Bank yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan 2000*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar
- Abimanyu, Anggito. 2006. Era Baru Kebijakan Fiskal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Sunyoto, Danang. 2010. *Aplikasi SPSS Untuk Statistik Ekonomi dan Bisnis*.  
Yogyakarta : Caps

Klinik-pajak, 2013. Tarif PPh. Diambil Maret 2013 dari <http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/pph/tarif-pph>

Pajak, 2012. Belajar Pajak. Diambil Maret 2013 dari  
<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Wikipedia, 2010. Pajak Penghasilan. Diambil Maret 2013 dari  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan)